

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian. Selain itu juga untuk bahan perbandingan dalam penyusunan skripsi ini yang berguna mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian selanjutnya. Penelitian – penelitian terdahulu diantaranya :

1. Berdasarkan penelitian Desi Fabiola (1997) yang mengambil judul tentang “Analisis Pengadaan Bahan Baku Tebu Pada PT. PG. Rajawali II Majalengka” menyatakan bahwasanya penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui perencanaan optimal dalam penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh PT. PG. Rajawali II Majalengka terutama dalam penggunaan lahan dan jadwal giling. Dari hasil optimalisasi yang dihasilkan juga dapat dievaluasi penggunaan areal lahan serta jadwal giling tersebut juga dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam pelaksanaan produksinya. Hasil optimalisasi yang telah dilakukan kesimpulannya bahwa kegiatan proses pengadaan bahan baku tebu meliputi kegiatan pengadaan bahan baku dari usaha tani TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) Kerjasama lebih menguntungkan dibandingkan dengan kegiatan pengadaan bahan baku TRI Murni dinilai dari sisi pabrik. Dari sisi lain kegiatan pengadaan bahan baku untuk TRI Murni inipun tidak dapat memberikan pendapatan lebih

bagi petani dibandingkan dengan usaha tani lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian di atas adalah, dengan mempertimbangkan hasil optimalisasi yang ada maka hal yang harus dilakukan oleh pabrik adalah meningkatkan rendemen tebu giling baik tebu dari TRI kerjasama maupun TRI murni. Dan penggunaan lahan tebu nonkerjasama perlu dikurangi, karena dapat merugikan pabrik.

2. Penelitian dari Cakraningrum Triwiyanti (2000) yang berjudul “Optimalisasi Pengadaan Bahan Baku Pabrik Gula Pada PG. Mojo Sragen”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan proses pengadaan bahan baku tebu setelah dihapusnya Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dengan Inpres No. 511997, industri gula tebu terutama di Jawa mengalami penurunan jumlah produksi. Disebabkan karena pabrik gula di Jawa yang umumnya sangat tergantung pada pasokan tebu rakyat (sistem TRI) ini kekurangan bahan baku. Oleh karena itu analisis optimalisasi pengadaan bahan baku tebu pada industri gula pasir menjadi sangat strategis dan menarik untuk diteliti.

Bahwasanya penelitian yang mengambil judul “Analisis Sistem Pengadaan Bahan Baku Tebu Pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Poerwodadie Magetan” ini berbeda dari penelitian –penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada prosedur pengadaan bahan baku tebu, yaitu Pabrik Gula Poerwodadie merupakan salah satu perusahaan

dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara XI yang bergerak dalam industri baik pengolahan dan produksi gula. Bahan baku yang digunakan adalah tebu, sedangkan gula merupakan produk utama yang dihasilkan, selain itu juga Pabrik Gula Poerwodadie menghasilkan produk sampingan berupa tetes. Dalam pengadaan bahan baku Pabrik Gula Poerwodadie memperolehnya dari dua sumber yaitu dengan membeli tebu dari lahan petani sendiri atau istilah umumnya adalah Tebu Rakyat (TR) dan Tebu Sendiri (TS) yang berasal dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang biasanya diambil  $\pm 5\%$  dari keseluruhan lahan pabrik tersebut dimana penanaman dan pengolahannya dilakukan sendiri oleh Pabrik Gula Poerwodadie. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa prosedur pengadaan bahan baku tebu diperoleh dengan dua cara yaitu dari TR (Tebu Rakyat) dan TS (Tebu Sendiri), hal ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu.

## **2.2. Kajian Teoritis**

### **2.2.1. Sistem Informasi Akuntansi**

#### **A. Definisi Sistem**

Sistem menurut pengertian yang dikemukakan oleh Susanto (2004:24) bahwa :

Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Menurut Widjajanto dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2001:2) mengemukakan bahwa, sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu : input, proses, dan output.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dari pengertian tersebut juga, dapat dikemukakan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem, karena akuntansi memiliki berbagai jenis kegiatan, yang satu sama lain saling berhubungan dalam melaksanakan fungsi akuntansi.

#### B. Jenis-jenis Sistem

Menurut Jogiyanto (1999: 687), Sistem dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

- Sistem abstrak, adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide - ide yang tidak tampak secara fisik.
- Sistem phisik, adalah sistem yang ada secara phisik.
- Sistem alamiah, adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia.
- Sistem buatan manusia, adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

- Sistem tertentu, adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan.
- Sistem tak tentu (*probabilistik system*), adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
- Sistem tertutup, adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya.
- Sistem terbuka, adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

Sedangkan Pohan dan Bahri (1997: 2) menjelaskan bahwa pada dasarnya hanya ada dua jenis sistem yaitu:

- Sistem alami seperti sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem reproduksi dan lain sebagainya; ada
- Sistem buatan manusia seperti sistem hukum, sistem perpustakaan, sistem transportasi dan lain sebagainya.

### C. Elemen Sistem

Menurut Pressman (2001:274) ada 6 elemen dasar yang membangun sebuah sistem, diantaranya :

#### 1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras bagi suatu system informasi terdiri atas computer (pusat pengolah, unit masukan/keluaran), peralatan

penyiapan data, dan terminal masukan/keluaran mencakup piranti-piranti fisik seperti computer dan printer.

2. Perangkat lunak (*Software*)

Sekumpulan intruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.

3. Prosedur (*Procedure*)

Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkit keluaran yang dikehendaki.

4. Manusia (*Human*)

Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.

5. Basis Data (*Database*)

Sekumpulan tabel, hubungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti *diskette*, *hard disk*, *magnetic tape*, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain diatas kertas, *mikro film*, dan lain sebagainya.

6. Dokumentasi (*Documentation*)

Informasi yang bersifat deskriptif (misalnya, buku panduan, *online help*, situs web) yang menggambarkan pengguna dan atau pengoperasian sistem.

#### D. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Definisi Standar Operasional Prosedur menurut (*Committee of the NWCG Training Working: 2003*) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa *responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnya setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar *akuntabilitas* kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Dari Penjabaran diatas terdapat beberapa Fungsi, Tujuan dan Manfaat Standar Operasional Prosedur. (egg-animation.blogspot.com, 2013)

1. Menjelaskan detail setiap kegiatan dari proses yang dijalankan.
2. Adanya standarisasi kegiatan.
3. Membantu dalam pengambilan keputusan.
4. Memudahkan dalam transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi.
5. Mengarahkan suatu pekerjaan kepada konsep yang jelas.

#### *E. Job Description*

*Job Description* (Deskripsi Pekerjaan) menurut Nitisemito (1992: 19) adalah daftar tugas-tugas umum, atau fungsi, dan tanggung jawab dari sebuah posisi. Biasanya, hal itu juga termasuk kepada siapa laporan posisi, spesifikasi seperti kualifikasi yang dibutuhkan oleh orang dalam pekerjaan, gaji range untuk posisi, dan lain-lain. Deskripsi pekerjaan biasanya dikembangkan dengan melakukan analisis pekerjaan, yang meliputi pemeriksaan tugas dan urutan tugas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Analisis terlihat di bidang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Perhatikan bahwa peran adalah himpunan tanggung jawab atau hasil yang diharapkan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Manfaat *job description* antara lain :

1. Membantu atasan dan bawahan mengerti: Mengapa suatu jabatan diadakan dan Apa tujuan utamanya.
2. Sebagai Alat Manajemen untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi :  
*Performance Management, Staffing & Selection, Organization Design, Reward System, Career Development & Training.*

#### F. Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam unit besar berarti mencakup seluruh kegiatan perusahaan, seperti yang dikemukakan Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:163) mengemukakan bahwa Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut IAI (2001:319.2) yang dikutip oleh Soekrisno Agoes dalam Auditing (2004:79) mendefinisikan bahwa Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kemudian menurut Nugroho Widjajanto dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2001:18) mendefinisikan bahwa Pengendalian

Internal (*Internal Control*) adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk :

- mengamankan aktiva perusahaan,
- mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi,
- meningkatkan efisiensi, dan
- mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Dari definisi Pengendalian Intern tersebut, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut :

- a. Pengendalian Internal merupakan suatu proses. Pengendalian Internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian Internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat *pervasive* dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.
- b. Pengendalian Internal dijalankan oleh orang. Pengendalian Internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.
- c. Pengendalian Internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam

semua Pengendalian Internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan Pengendalian Internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

- d. Pengendalian Internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen, digunakan untuk melakukan pengendalian seluruh jenis kegiatan, yang dilakukan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula terhadap salah satu kegiatan yang terdapat di dalam perusahaan, yaitu kegiatan pengelolaan kas. Pengendalian pada umumnya dilakukan agar seluruh kegiatan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, selain agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, juga agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

### **2.2.2. Sistem Pengadaan**

Sistem informasi juga diperlukan dalam pengadaan bahan baku untuk kelancaran proses pembelian bahan baku dari pemasok serta kepada pembeli. Prosedur pembelian bahan baku melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar pelaksanaan pembelian bahan baku dapat diawasi dengan baik. Salah satu penyebab terjadinya kecacauan-kecacauan dalam prosedur pembelian bahan baku adalah lemahnya pengendalian intern pada sistem dan prosedur yang

mengatur suatu transaksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka setiap perusahaan perlu menyusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menciptakan pengendalian intern yang baik dalam mengatur pelaksanaan transaksi perusahaan. (Wikipedia, 2013)

Sistem dan prosedur pengadaan mengatur cara-cara dalam melakukan semua pembelian baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem dan prosedur pengadaan bahan baku adalah (Wikipedia, 2013) :

1. Mencegah pemborosan, karena membeli barang yang seharusnya tidak diperlukan.
2. Mencegah permainan harga yang dapat merugikan perusahaan.
3. Mencegah pembelian fiktif.
4. Memperpendek masa transaksi dari mulai pesanan sampai barang datang.

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku adalah sebagai berikut (Wikipedia, 2013) :

1. Fungsi Gudang

Dalam sistem akuntansi pembelian bahan baku, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian bahan baku kepada fungsi pembelian sesuai dengan persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan barang.

## 2. Fungsi Pembelian

Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang terpilih.

## 3. Fungsi Penerimaan

Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab menerima barang dari transaksi retur penjualan.

## 4. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab terhadap pencatatan hutang dan pencatatan persediaan. Fungsi pencatatan hutang bertanggung jawab mencatat terjadinya hutang, sedangkan fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab mencatat harga pokok barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan.

### **2.2.3. Sistem Pengendalian Internal**

#### A. Pengendalian Internal

Pengendalian internal dalam unit besar berarti mencakup seluruh kegiatan perusahaan, seperti yang dikemukakan Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:163) mengemukakan bahwa

Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut IAI (2001:319.2) yang dikutip oleh Soekrisno Agoes dalam Auditing (2004:79) mendefinisikan bahwa Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kemudian menurut Nugroho Widjajanto dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2001:18) mendefinisikan bahwa Pengendalian Intern (*Internal Control*) adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk :

- mengamankan aktiva perusahaan,
- mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi,
- meningkatkan efisiensi, dan
- mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Dari definisi Pengendalian Internal tersebut, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut :

- a. Pengendalian Internal merupakan suatu proses. Pengendalian Internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian Internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat *pervasive* dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.
- b. Pengendalian Internal dijalankan oleh orang. Pengendalian Internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.
- c. Pengendalian Internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua Pengendalian Internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan Pengendalian Internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- d. Pengendalian Internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen, digunakan untuk melakukan pengendalian seluruh jenis kegiatan, yang dilakukan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula terhadap salah satu kegiatan yang terdapat di dalam perusahaan, yaitu kegiatan

pengelolaan kas. Pengendalian pada umumnya dilakukan agar seluruh kegiatan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, selain agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, juga agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

#### B. Pengertian Sistem Pengendalian Internal.

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Menurut James Hall (2009) dalam *Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* mengemukakan, bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Mardi (2011:59) menjelaskan pengendalian internal dalam arti sempit dan luas. Pengendalian internal dalam arti sempit disamakan dengan *internal check* yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Sedangkan dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan *management control* yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan COSO (*Committe of Sponsoring Organization*) dalam Romney dan Steinbart (2006:230), pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### C. Tujuan Sistem Pengendalian Internal.

Widjaja (1995:2) menggaris bawahi bahwa tujuan sistem pengendalian internal yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi: Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil keputusan yang penting. Sistem pengendalian akuntansi internal bertujuan untuk mengamankan/menguji kecermatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat.
2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya: Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak disengaja. Sistem pengendalian internal dibentuk

guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha: Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien.
4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan: Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

Sedangkan dalam (Mardi, 2011: 59) tujuan pengendalian internal, yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

#### D. Ciri-ciri Pokok Sistem Pengendalian Internal.

Menurut Baridwan (1993) ciri-ciri pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.

2. Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang-utang, pendapatan-pendapatan, biaya-biaya.
3. Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi di setiap bagian dalam organisasi.
4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah ukuran-ukuran atau prosedur-prosedur yang saling berhubungan dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan agar mencapai tujuan-tujuan yang berkaitan dengan keandalan data akuntansi, menjaga kekayaan organisasi, mendorong efektivitas dan efisiensi, mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan.

#### **2.2.4. Komponen Pengendalian Internal oleh COSO**

##### **A. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian terdiri faktor-faktor berikut ini:

1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika.

Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Pihak manajemen

harus mengembangkan kebijakan yang tertulis dengan jelas, yang secara eksplisit mendiskripsikan perilaku yang jujur dan tidak jujur. Seluruh tindakan yang tidak jujur harus secara menyeluruh diinvestigasi, dan mereka yang dianggap bersalah harus dibebaskan tugasnya. Pegawai yang tidak jujur harus dituntut untuk membuat pegawai mengetahui bahwa perilaku semacam ini tidak akan diperbolehkan.

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya operasi.

Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggung jawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu.

3. Komitmen terhadap kompetensi.

Untuk mencapai tujuan entitas, personel disetiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. Dalam lingkungan

bisnis global, produk dan jasa bersaing untuk merebut kepuasan customers melalui kandungan pengetahuan yang berada dalam produk jasa tersebut. Oleh karena itu, komitmen manajemen terhadap kompetensi akan mengakibatkan produk dan jasa yang dihasilkan bagi kepentingan konsumen berisi kandungan pengetahuan (*knowledge content*) memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

#### 4. Dewan komisaris dan komite audit.

Menurut Mardi (2011:63) Komite audit bertanggung jawab mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap peraturan serta standar yang terkait. Komite berhubungan secara dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan. Peninjauan ini berfungsi untuk memeriksa integritas manajemen guna meningkatkan kepercayaan publik yang berinvestasi atas kesesuaian pelaporan keuangan.

#### 5. Struktur organisasi.

Menurut Mardi (2011:63) Struktur yang jelas dan tegas menunjukkan batas wewenang seseorang melalui garis komando dan menetapkan garis otoritas serta tanggung jawab, termasuk sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas tertentu, pembagian wewenang terhadap tanggung jawab seseorang memengaruhi informasi manajemen.

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.

Menurut Mulyadi (2002:187) Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Pengendalian intern yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

B. Aktivitas Pengendalian

Menurut Mulyadi (2002:189) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Menurut Mardi (2011: 63) Aktivitas pengendalian pada dasarnya berbentuk pengendalian yang menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi dan pengendalian yang menggunakan pendekatan manual. Pengendalian berdasarkan teknologi informasi secara khusus berkaitan dengan lingkungan teknologi dari pengendalian umum dan aplikasi. Pengendalian umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan audit teknologi informasi yang ditujukan melindungi lingkungannya agar dikelola secara baik, sehingga proses pengendalian mendapatkan dukungan lebih efektif. Berkaitan dengan pengendalian aplikasi lebih ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pada pengolahan data sistem komputer.

Pengendalian fisik berkaitan dengan sistem konvensional yang melakukan aplikasi prosedur manual. Namun, konsep pengendalian ini tetap memperhatikan dampak pengendalian yang berhubungan dengan lingkungan teknologi informasi, pengendalian fisik dalam perusahaan terdiri dari beberapa unsur berikut:

1. Kewenangan penanganan transaksi
2. Spesialisasi tanggung jawab
3. Format dan penggunaan dokumen pekerjaan
4. Pengamanan harta kekayaan perusahaan
5. Independensi pemeriksaan

### C. Penilaian Risiko

Menurut Mulyadi (2002:188) Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Sedangkan menurut Mardi (2011:64) dampak dari perencanaan strategis dan operasional serta keuangan dan informasi akan menimbulkan risiko bisnis, beberapa kebijakan bias berakibat yang lebih besar serta kemungkinan muncul lebih besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan biaya dan manfaat pengendalian harus direncanakan dan diperhitungkan secara cermat sehingga kegagalan dan risiko dapat diminimalisir dampaknya.

### D. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas. Focus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

1. Sah.
2. Telah diotorisasi.
3. Telah dicatat.
4. Telah dinilai secara wajar.
5. Telah digolongkan secara wajar.
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.
7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

#### E. Pemantauan

Menurut Mulyadi (2002:195) pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

Menurut Mardi (2011:65) Pengawasan yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kinerja bukan untuk menghilangkan kinerja dan prestasi perusahaan. Di beberapa perusahaan, hal ini kurang mendapat perhatian. Pengawasan yang dilakukan, antara lain supervise yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, dan audit internal.

Dari lima komponen pengendalian internal oleh COSO di atas, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Dalam pabrik gula ini lima komponen tersebut sudah diterapkan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian.
  - a. Adanya struktur organisasi dan pemisahan tugas.
  - b. Adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan.
  - c. Memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi pengeluaran kas.
  - d. Adanya penganggaran sehingga dapat merencanakan apa yang menjadi kebutuhan pabrik gula.
2. Penilaian Risiko
  - a. Adanya perencanaan anggaran untuk dapat meminimalisir risiko.
  - b. Adanya pengotorisasian dan persetujuan pihak yang berwenang atas transaksi yang dilakukan.
3. Aktivitas Pengendalian
  - a. Telah dibuatnya dokumen tersendiri dalam setiap pekerjaan.
  - b. Dilakukannya pengecekan transaksi setiap bulannya.
  - c. Adanya pemisahan tugas yang sesuai
4. Informasi dan Komunikasi
  - a. Semua transaksi yang terjadi telah dicatat serta digolongkan sesuai dengan bukti yang ada dan waktu terjadinya transaksi.

- b. Bagian akuntansi setiap bulan selalu membuat laporan keuangan mengetahui semua aktivitas yang terjadi di bagian keuangan.
- c. Kepala bagian keuangan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan.

5. Pemantauan

- a. Adanya pengawasan terhadap kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja.
- b. Kepala bagian keuangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan karyawan terhadap prosedur yang telah dibuat.

**2.2.5. Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Mardi (2011:60) agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok yang dapat mendukung prosesnya. Adapun unsur pokok system pengendalian internal adalah:

1. Struktur Organisasi; merupakan suatu kerangka pemisahan tanggung jawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan antara setiap fungsi yang ada dan suatu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanisme saling mengendalikan antarfungsi secara maksimal.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi. Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak

dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memberi otorisasi.

3. Pelaksanaan kerja secara sehat. Tata kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (*prudent*) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi diawal sampai akhir sendirian, harus rolling antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang telah diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan.
4. Pegawai berkualitas. Salah satu unsur pokok penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Tidak hanya berkualitas, tetapi kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan. Pegawai yang berkualitas dapat ditentukan

berdasarkan proses rekrutmen yang dilakukan kepada mereka, apakah berbasis professional atau berdasarkan *carity* (kedekatan teman).

#### **2.2.6. Keterbatasan Pengendalian Intern Suatu Entitas**

Menurut Mulyadi (2002:181) pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

#### **2.2.7. Pengendalian Internal Pada Pengadaan Bahan Baku Tebu**

Tanaman tebu digunakan oleh pabrik gula sebagai bahan baku utama dari pembuatan gula. Dalam prosesnya tebu digiling dan menghasilkan dua macam jenis yaitu laktosa dan glukosa. Laktosa adalah tetes dan glukosa adalah gula itu sendiri yang kemudian diolah menjadi gula pasir.

Pengertian dari bahan baku meliputi semua bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pabrik, kecuali terdapat bahan-bahan yang secara fisik digabungkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik tersebut.

Soekarwati (2002) menggaris bawahi tersedianya bahan baku yang cukup besar merupakan faktor penting guna menjamin kelancaran proses produksi. Akan tetapi jumlah persediaan bahan baku yang terlalu banyak

akan mengakibatkan pemborosan bagi perusahaan. Karena dengan jumlah persediaan bahan baku yang besar tersebut akan mengakibatkan bertambahnya biaya penyimpanan bahan baku. Sebaliknya apabila persediaan bahan baku terlalu sedikit maka akan sering terjadi pembelian bahan baku, sehingga biaya yang digunakan untuk memesan bahan baku tersebut juga semakin besar.

Setiap perusahaan, khususnya perusahaan industri harus mengadakan persediaan bahan baku, karena tanpa adanya persediaan bahan baku akan mengakibatkan terganggunya proses produksi dan berarti pula bahwa pengusaha akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Persediaan yang berlebihan akan merugikan perusahaan. Ini berarti banyak biaya yang dikeluarkan dari biaya-biaya yang ditimbulkan dengan adanya persediaan tersebut, yang mana biaya dari pembelian itu sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, kekurangan persediaan bahan baku dapat merugikan perusahaan karena akan mengganggu kelancaran dari proses kegiatan produksi dan distribusi perusahaan.

Apabila semua permasalahan itu tidak diantisipasi, maka kerugian yang akan diderita oleh perusahaan sehubungan dengan penyelenggaraan persediaan bahan baku yang terlalu besar menurut Ahyari ( 2003 ), antara lain :

- a. Biaya penyimpanan atau pergudangan yang akan menjadi tanggungan perusahaan akan menjadi semakin besar, yang meliputi biaya sewa

gudang, resiko kerusakan bahan dalam penyimpanan, resiko kehilangan, resiko kadaluwarsa, resiko penurunan kualitas bahan dalam penyimpanana, dll.

- b. Tingginya biaya peyimpanan dan investasi dalam persediaan bahan baku yang ala di dalam perusahaan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembiayaan dan investasi di bidang-bidang yang lain.
- c. Apabila perusahaan yang bersangkutan mempunyai persediaan bahan baku yang sangat besar, maka adanya penurunan harga pasar akan merugikan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat mengetahui gambaran harga pasar dari bahan baku dalam waktu waktu yang akan datang.

Beberapa kelemahan yang ada apabila perusahaan menyelenggarakan persediaan bahan baku dalam jumlah yang sangat kecil menurut Ahyari (2003), adalah :

- a. Persediaan bahan baku dalam jumlah yang kecil kadang kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan untuk pelaksanaan proses produksi. Untuk menjaga kelangsungan proses produksi, maka pada umumnya perusahaan akan mengadakan pembelian dalam jumlah kecil dan mendadak, sehingga harga beli bahan baku tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan pembelian normal perusahaan. Apabila suatu perusahaan sering kehabisan bahan baku, maka pelaksanaan proses produksi tidak akan berjalan dengan

lancar. Sebagai akibatnya, kualitas dan kuantitas produk akhir yang dihasilkan perusahaan menjadi sering berubah pula.

- b. Persediaan bahan baku dalam jumlah yang relatif kecil akan mengakibatkan frekuensi pembelian bahan baku menjadi semakin tinggi sehingga biaya pemesanan bahan baku juga bertambah besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikembangkan adanya sistem pengawasan persediaan bahan baku yang optimal menurut Ahyari (2003), yaitu :

- a. Berapa besar persediaan bahan baku perusahaan.
- b. Berapa besar bahan baku yang dibeli
- c. Kapan mengadakan pembelian kembali.

Dari penjabaran diatas yang telah dipaparkan terdapat juga problema dalam pengadaan bahan baku tebu. Terutama adalah kendala dalam konteks biaya pengadaan bahan baku tebu, khususnya untuk TR (Tebu Rakyat) yang biayanya dikalkulasi sendiri oleh petani tebu setempat dan ini juga membutuhkan dana yang besar pula.

Selama ini pengadaan bahan baku tebu terutama masih mengandalkan TR (Tebu Rakyat) dibandingkan dengan TS (Tebu Sendiri) karena luas lahan TS masih terbatas jumlahnya.

#### **2.2.8. Kajian Perspektif Islam**

Dalam hadist telah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memiliki sifat jujur. Salah satu sifat atau moral seorang manusia yang paling utama adalah sifat jujur, karena jujur merupakan suatu dasar kebahagiaan

masyarakat. Kejujuran ini menyangkut banyak hal terutama dalam segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak.

Begitu juga dengan proses dalam pengadaan bahan baku tebu, hal ini dapat dilihat dari hadist Bukhari yang mengatakan:

***“ Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surge. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur (shidiq).***

***Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan, akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong (kadzdzab).” (H.R Bukhari)***

Selain itu, didalam al-qur'an juga dijelaskan agar kita memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apa yang kita kerjakan supaya tidak menimpakan suatu musibah terhadap orang lain. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujarat ayat 6, sbb:

بِجَهَالَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَأَ يَا  
نَادِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فُتُصِبِحُوا

***“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”***

***(Q.S Al-Hujarat:6)***

Ketika kita memiliki jabatan, hendaknya kita dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan jabatan yang selama ini kita pegang. Amanah dalam memegang jabatan dengan tidak melakukan kecurangan, akan mendatangkan banyak kepercayaan dari orang sekitar untuk tetap memegang jabatan tersebut. Namun, tidak hanya dapat tanggung jawab saja melainkan kita juga harus jujur dan berpengetahuan luas. Seperti kisah nabi yusuf yang dijelaskan dalam al-qur'an surat yusuf ayat 55 sbb:

عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّي مِنَ الْأَرْضِ خَزَائِنٍ عَلَىٰ اجْعَلْنِي قَالَ

***“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf:55)***

Allah SWT juga menegaskan tentang pengertian bekerja keras dalam firmanNya yaitu :

طَيِّبَةَ حَيَاةٍ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ مَوْمِنٌ وَهُوَ أُتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صَلَاحًا عَمَلٍ مَنْ

يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنَ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

***“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan.”(An Nahl : 97).***

Sebaik-baik manusia dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu harus memiliki kode etik yang menunjukkan bahwa kita memiliki suri tauladan yang baik seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

الْيَوْمَ وَاللَّهُ يُرْجُوا كَانَ لِمَنْ حَسَنَةً أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ  
كَثِيرًا اللَّهُ ذَكَرَ وَالْآخِرَ

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)*

### 2.2.9. Kerangka Berfikir

